

ABSTRAK

MUHD. ALI ZAENAL ABIDIN, 01012011153 *Perlindungan Terhadap Tersangka Atas Hak Memberikan Keterangan Secara Bebas Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana Di Kepolisian Resort Kota Ternate* (Dibimbing oleh Bpk. Fathurrahi dan Bpk. Aslan Hasan)

Penelitian ini bertujuan untuk penyidik supaya mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Perkara Pidana di POL-RES Kota Ternate. Untuk mengetahui hak daripada tersangka atas hak asasi memberikan keterangan secara bebas dalam proses penyidikan, serta menganalisis faktor yang mempengaruhi tersangka atas hak memberikan keterangan secara bebas dalam proses penyidikan perkara pidana di POL-RES Kota Ternate.

Penelitian ini dilakukan di Rumah Tahanan Klas IIB dan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kota Ternate Maluku Utara dan Data primer merupakan data yang di dapatkan langsung di lapangan yaitu di POLRES Ternate Jalan Hasan Esa Komp Pelabuhan Pulau Ternate, No 1, Takoma, kec. Ternate Tengah, Kota Ternate. Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris artinya jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Hal ini artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Ketika data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada kajian untuk penyelesaian masalah.

Perlindungan hukum terhadap tindakan kekerasan fisik dan intimidasi psikis terhadap tersangka dalam proses penyidikan, diperlukan serangkaian langkah strategis yang sistematis dan terpadu. Peningkatkan pengawasan internal dan eksternal terhadap kinerja aparat kepolisian menjadi suatu hal yang harus dilakukan. Pembentukan unit pengawas independen yang memiliki otoritas untuk melakukan audit dan inspeksi rutin terhadap proses penyidikan dapat berfungsi sebagai mekanisme deteksi dini dan pencegahan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. kepada tersangka. Unit pengawas ini harus memiliki wewenang untuk mengambil tindakan disipliner terhadap oknum penyidik yang terbukti melakukan kekerasan atau intimidasi.

Hendaknya Lembaga Kepolisian Republik Indonesia menjalankan uji kelayakan kepada calon penyidik yang bertujuan untuk menilai kemampuan teknis, integritas, dan profesionalisme anggota kepolisian tersebut. Hanya mereka yang memenuhi standar tinggi dalam hal pengetahuan hukum, integritas, dan kemampuan analisis yang akan dipilih sebagai penyidik. Implementasi uji kelayakan ini akan membantu meningkatkan kualitas penyidikan, mencegah kekerasan fisik dan intimidasi psikis terhadap tersangka.

Kata Kunci: *Penyidikan, Tersangka, Hak Asasi Manusia*

ABSTRACT

MUHD. ALI ZAENAL ABIDIN, 01012011153 *Protection of Suspects for the Right to Give Information Freely in the Criminal Case Investigation Process at the Ternate City Resort Police* (Guided by Mr. Fathurrahi and Mr. Aslan Hasan)

This study aims for investigators to know and analyze Legal Protection Against Criminal Cases in POL-RES Ternate City. To know the rights of suspects to human rights to give information freely in the investigation process and analyze factors that influence suspects on the right to give information freely in the process of investigating criminal cases at the POL-RES Ternate City.

This research was conducted at the Class IIB Detention Center and Class IIA Penitentiary, Ternate City, North Maluku and the primary data is data obtained directly in the field, namely at the Ternate Police Station, Jalan Hasan Esa, Ternate Island Port Comp, No. 1, Takoma, Central Ternate District, Ternate City. This research will be prepared using the type of empirical juridical research, meaning the type of sociological legal research and can be called field research, which examines applicable legal provisions and what happens in reality in society. This means a study conducted on the actual situation or real situation that occurs in the community with the intention of knowing and finding the facts and data needed. When the required data is collected, it then leads to the identification of the problem which ultimately leads to a study for problem solving.

Legal protection against acts of physical violence and psychological intimidation of suspects in the investigation process requires a series of systematic and integrated strategic steps. Increasing internal and external supervision of police officers' performance is something that must be done. The establishment of an independent supervisory unit that has the authority to conduct regular audits and inspections of the investigation process can serve as an early detection and prevention mechanism against human rights violations. to the suspect. This supervisory unit must have the authority to take disciplinary action against investigators who are proven to have committed violence or intimidation.

The Indonesian National Police Agency should conduct due diligence on prospective investigators aimed at assessing the technical ability, integrity, and professionalism of police members. Only those who meet high standards in terms of legal knowledge, integrity, and analytical skills will be selected as investigators. The implementation of this due diligence will help improve the quality of investigations, prevent physical violence and psychological intimidation of suspects.

Keywords: Investigation, Suspect, Human Rights